

PERTAUTAN KEPENTINGAN ANTAR ELIT : STUDI TARIK ULUR KEPENTINGAN POLITIK ANTAR ELIT DALAM PEMBENTUKAN KABUPATEN PANGANDARAN

**Fitriyani Yuliawati¹
Subhan Agung²**

ABSTRACT

Society certainly craves a more prosperous life, safe, peaceful, able to feed their family properly and wants other ideal. In today's the countries in the world of hopes and ideals via a mechanism known system and democracy. New mechanisms are emerging as the insistence of the Reformation is the insistence of Indonesia's regions to secede from the parent that we often refer to as autonomy. Insistence that gave birth to hundreds of new areas, both at the provincial and district / city emerged in Indonesia today. On one hand if we look at it positively, it is possible as the manifesto of a high sense of community ownership of their respective regions as well as the willingness to self-determination. On the other hand new problems arise as well as political risk, which appears sectarianism "sons of the soil" who gave birth to tribalism and excessive primordialism, resource conflict, conflict of interest, rampant corruption among local officials and that no harm is less conflict among local political elites in a fight over power and the existence of self and group interests in the name of the people.

Risks in above which we discuss in this research study, with a focus study on the tug between the interests of local political elites in the division of the district of Pangandaran. With purposive sampling method of data collection and methods of interactive analysis, the study seeks to illustrate how the actual role, political intrigues and interests the desired political elites in the expansion of Pangandaran. How well conflict of interest occurs in the process of expansion of this district of Pangandaran. Hopefully this research is useful for those who want to further examine the processes and dynamics that occur, and how political elites play political roles.

Keywords: decentralization, regional division, the local political elite, linkage of interest

ABSTRAK

Masyarakat sangat mendambakan kehidupan yang sejahtera, aman, tentram, mampu menghidupi keluarganya secara layak dan keinginan ideal lainnya. Saat ini hampir sebagian besar negara di dunia menggantungkan harapan dan cita-cita tersebut lewat sistem dan mekanisme yang dikenal demokrasi. Mekanisme terbaru yang muncul sebagai desakan Reformasi adalah desakan daerah-daerah di Indonesia untuk melepaskan diri dari daerah induknya yang sering kita sebut sebagai otonomi daerah. Desakan itulah yang melahirkan beratus-ratus daerah baru, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota muncul di Indonesia saat ini. Secara positif, hal itu dimungkinkan sebagai manifestasi dari rasa kepemilikan yang tinggi masyarakat terhadap daerahnya masing-masing serta kemauan untuk menentukan nasibnya sendiri.

¹⁻² Staf Pengajar Ilmu Politik FISIP Universitas Siliwangi Tasikmalaya

Namun disisi lain masalah baru sebagai resiko politiknya juga timbul, yakni muncul sektarianisme “putra daerah” yang melahirkan sukuisme dan primordialisme berlebihan, konflik sumber daya, konflik antar kepentingan, merajalelanya korupsi di kalangan pejabat daerah dan yang tidak kalah membahayakannya adalah konflik antar elit politik lokal dalam berebut kekuasaan dan eksistensi diri dan kelompoknya dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat.

Resiko-resiko di ataslah dibahas dalam penelitian ini, dengan fokus pada tarik ulur kepentingan antar elit politik lokal dalam pemekaran kabupaten Pangandaran. Dengan metode pengumpulan data *purposive sampling* dan metode analisis interaktif, penelitian ini berupaya menggambarkan bagaimana sebenarnya peranan, intrik-intrik politik dan kepentingan yang diinginkan para elit politik dalam pemekaran Pangandaran. Bagaimana juga konflik antar kepentingan terjadi dalam proses pemekaran kabupaten Pangandaran ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi yang ingin mengkaji lebih lanjut proses dan dinamika yang terjadi, serta bagaimana para elit politik memainkan peran-peran politiknya.

Kata Kunci : otonomi daerah, pemekaran daerah, elit politik lokal, pertautan kepentingan

PENDAHULUAN

Pemekaran wilayah merupakan salah satu fenomena yang paling *booming* pada era otonomi daerah ini. Semakin banyak daerah yang merasa mampu menjalankan pemerintahannya sendiri, perbincangan diseputar wacana pemekaran wilayah (kabupaten/kota dan provinsi), akhir-akhir ini merupakan salah satu tema politik yang banyak dibicarakan di masyarakat setelah media baik cetak maupun elektronik menyoroti tentang kasus pembentukan provinsi Tapanuli di Sumatra Utara yang akhirnya menimbulkan korban dengan tewasnya ketua DPRD Sumut. Pergolakan seputar diskursus tentang pemekaran wilayah bahkan sudah sangat mengkristal dan mewacana dengan cepat, tajam, dan menimbulkan friksi politik yang keras. Maka tak heran isu ini menjadi seperti “bola salju”, yang kian menggelinding khususnya dalam zona politik lokal.

Sebagai contoh untuk menggambarkan hal di atas adalah semisal munculnya provinsi-provinsi baru di daerah Sumatera Utara, entah itu menjadi dua atau tiga provinsi. Selain itu, fenomena pemekaran pun marak terjadi pada tingkat kabupaten, seperti yang terjadi pada kabupaten Bandung, kabupaten Bandung Barat adalah beberapa daerah yang mengalami gejolak pemekaran. Wacana ini merupakan hal yang wajar, mengingat beberapa daerah lainnya telah “sukses” dalam melakukan pemekaran. Misalnya, kabupaten Ciamis yang

dimekarkan menjadi 2 Kabupaten melalui UU No. 27 tahun 2002 mengenai Pembentukan Kota Banjar di Jawa Barat yang disahkan pada tanggal 11 Desember 2002 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 21 Februari 2003, yaitu kabupaten Ciamis dan kota Banjar yang dianggap efektif oleh masyarakat kabupaten Ciamis dan kota Banjar karena telah berhasil memandirikan kota Banjar, baik pada segi ekonomi maupun pemerintahan. Sehingga, keberhasilan ini akhirnya menimbulkan wacana baru pemekaran kabupaten Ciamis Selatan (Pangandaran saat ini).

Sebagai sebuah isu yang menggelepas di masyarakat, tentunya berbagai pandangan mencuat dari berbagai pihak, sehingga isu ini pun berubah menjadi "bola panas". Perdebatan-perdebatan panjang kemudian digelar, namun tetap tak berujung. Hal inilah yang kemudian memunculkan problema pro dan yang kontra di masyarakat. Sebetulnya, perbedaan pendapat ini amatlah lumrah, terutama dikaitkan dengan proses perkembangan demokrasi di tanah air. Akan tetapi perbedaan pendapat ini haruslah ditata, diformulasikan, sehingga berakhir dengan suatu kebahagiaan bersama.

Berkembangnya wacana pemekaran daerah, tidak terlepas dari pemberlakuan prinsip-prinsip otonomi daerah. Secara eksplisit didalam UU No. 32 tahun 2004, memang telah dengan jelas diamanatkan bahwa pada prinsipnya otonomi daerah media atau jalan untuk menjawab tiga persoalan mendasar dalam tata pemerintahan dan pelayanan terhadap publik. *Pertama*, otonomi daerah haruslah merupakan jalan atau upaya untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat. *Kedua*, melalui otonomi daerah juga harus tercipta akuntabilitas yang terjaga dengan baik. *Ketiga*, bagaimana otonomi daerah diformulasikan menjadi langkah untuk mengupayakan responsiveness, dimana publik berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, timbul pertanyaan yang menjadi rumusan masalah penelitian ini yakni ; bagaimanakah tarik-ulur kepentingan antar elit politik dalam proses pemekaran kabupaten Pangandaran?

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teoritis

Menurut Kerlinger (dalam Masri Singarimbun, 1989 : 37), teori adalah serangkaian asumsi, konsep, kontruksi, definisi, preposisi untuk menerangkan

suatu fenomena sosial secara sistematis cara merumuskan hubungan antar konsep. Dari teori-teori inilah suatu fenomena dapat dipahami dan diterangkan. Kerangka dasar atau landasan teori adalah suatu uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan kaitannya seperti yang dirumuskan dalam perumusan masalah sehingga membantu kita dalam menentukan arah dan tujuan dari suatu penelitian.

Desentralisasi

Menurut Rondinelli dan Cheema (dalam Syamsuddin Haris, dkk, 2001 : 25) merumuskan desentralisasi dengan lebih merujuk pada perspektif yang lebih luas, namun, tergolong perspektif administrasi (*administrative decetralization perspective*). Dalam buku yang berjudul *Decentralization and Development: Policy Implementation in develoving countries*, dikemukakan bahwa desentralisasi adalah: *the transfer of planning, decision-making, or administrative authority from central government to its field organizations, local administrative units, semi autonomos and parastatal organizations, local government, or non-government organization*".

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Riggs (dalam Sarundajang, 2002 : 47) bahwa desentralisasi mempunyai dua makna, yaitu sebagai pelimpahan wewenang (*delegation*) dan pengalihan kekuasaan (*devolution*). *Delegation* mencakup penyerahan tanggung jawab kepada bawahan untuk mengambil keputusan berdasarkan kasus yang terjadi, tetapi pengawasan tetap berada pada pemerintah pusat. Sedangkan, *devolution* mempunyai makna yang berbeda, dimana seluruh tanggungjawab untuk kegiatan tertentu diserahkan sepenuhnya kepada penerima wewenang.

Konsepsi Otonomi Daerah

Dalam desentralisasi, daerah mempunyai hak untuk otonomi daerah, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri tanpa adanya tanpa adanya campur tangan dan intervensi dari pihak lain (pemerintah pusat) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pada hakikatnya otonomi daerah adalah : (1) Hak mengatur rumah tangganya sendiri bagi suatu daerah otonom; (2) Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenanga

otonominya itu di luar batas-batas daerahnya; (3) Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya; (4) Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tidak merupakan sub ordinasi hak mengatur dan mengurus daerah lain.

Demokrasi Lokal, Ketegangan dan Konflik antar Aktor

Sebuah konflik tentu saja tidak terlepas dari adanya suatu kepentingan atau tujuan diantara pihak-pihak yang berkonflik. Menurut Paul Conn dalam Maswadi Rauf (2000), tujuan konflik dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu: *pertama*, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik mempunyai tujuan yang sama-sama ingin mendapatkan, yaitu berupa perebutan jabatan atau kekuasaan politik atau jabatan pemerintahan. *Kedua*, satu pihak ingin mendapatkan, sedangkan pihak yang lain ingin mempertahankan apa yang selama ini dimiliki. Seperti yang terjadi dalam pemilihan calon legislatif. *Ketiga*, pihak-pihak yang terlibat konflik berusaha mempertahankan apa yang telah ada, baik berupa persaingan ekonomi, teknologi, persenjataan, dan sebagainya antarnegara.

John Higley dan Michael G. Burton (1987:17-18) menghidupkan teori konflik elite dalam korelasinya dengan transisi menuju demokrasi. Kedua pakar ini membagi tiga tahap struktur elit dalam proses transisi. *Pertama*, elit yang bersatu secara ideologis. Terjadi dalam negara otoriter. Dalam rezim yang otoriter, mayoritas elit yang kuat secara politik umumnya menjadi anggota partai politik yang sama, mendukung kebijakan politik yang sama dan menunjukkan loyalitas kepada pemimpin yang sama. Dalam situasi ini, politik sangat stabil namun partisipasi politik yang luas tidak terjadi. Bersatunya elite dalam negara otoriter dianggap bukan proses yang murni dan sukarela, namun dibentuk di bawah sistem yang represif. Secara rasional, para elite akan memilih untuk bersatu karena hanya melalui penyatuan diri dengan irama negara otoriter, maka kepentingan politik mereka terlindungi. *Kedua*, elite yang berkonflik. Bersatunya elite secara ideologis tidak akan bertahan lama. Penyatuan dianggap menentang hakikat masyarakat modern yang beragam. Pada saatnya, elit yang bersatupun akan pecah dan berkonflik satu sama lain. Dalam fase perpecahan, para elit secara publik mulai menunjukkan perbedaan. Mereka bukan saja berbeda dalam orientasi politik, namun mulai juga menjadi anggota partai yang berbeda dan

mendukung pemimpin yang berbeda pula. Konflik elit ini dianggap situasi yang tidak terhindari untuk keluar dari negara otoriter. Hanya, melalui konflik elite yang serius, negara otoriter menjadi rapuh dan kemudian jatuh. Konflik elite di satu sisi berjasa dalam pelumpuhan negara otoriter, namun di sisi lain juga berbahaya, jika konflik elit berterusan, negara selalu dalam keadaan krisis yang membuat politik tidak stabil. Jauh lebih berbahaya lagi, apabila konflik elit yang berkepanjangan dapat membuat negara selalu dalam ancaman kerusuhan, anarki dan kekerasan yang berdarah. *Ketiga*, elit yang berkompetisi dalam prosedur demokrasi. Untuk sampai ke demokrasi, para elite harus menapaki ke satu tahap yang lebih maju lagi. Yaitu mengubah struktur elit dari situasi konflik tanpa adanya aturan main bersama yang disepakati, menuju kompetisi elit dalam prosedur demokrasi

The Political Elite dan The Mass

Menurut Harold D. Laswell (Fedyani Akhmad, 1990:298), dikatakannya bahwa studi politik dapat dipandang sebagai studi tentang kekuasaan. Dalam pemahamannya, setiap masyarakat politik terbagi ke dalam dua kategori besar, yakni : *pertama*, sebagian kecil mereka yang berkuasa (*the political elite*) dan *kedua*, sebagian besar mereka yang dikuasai (*the mass*). Sedangkan Jasper B. Shannon juga menganggap esensi dari pemerintahan sebagai hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Menurutnya, mengamati kepemimpinan politik berarti memahami struktur, proses dan perilaku politik pemimpin, yaitu sebagian kecil orang yang berkuasa dalam masyarakat.

Penelitian ini salah satunya bersandarkan pada konsep teori elit. Elit politik pada dasarnya merupakan hal yang pasti muncul dalam kaitan negara dengan masyarakatnya. Masyarakat membutuhkan orang-orang yang cakap dalam bidang politik untuk mewujudkan kebaikan dan kesempurnaan atas kehidupan rakyatnya. Demikian pesan singkat Aristoteles, bapak penganjur demokrasi dalam *magnum oppus-nya Politea*.

Dari tinjauan di atas, Secara ideal bila rata-rata masyarakat menginginkan kemerdekaan dari penjajahan, maka elit harus berada dalam spektrum itu. Jika tidak, hanya ada dua kemungkinan, ikut terus bergumul dalam turbulensi sejarah atau tergilas dan ditinggal. Bila masyarakat menginginkan kesejahteraan dan keadilan sosial, maka siapapun yang duduk sebagai pemimpin di dalam hirarki

kekuasaan, apakah itu formal atau tidak, mesti sekuat tenaga mengusahakan kesejahteraan dan keadilan sosial itu bagi masyarakat. Sederhananya, bagi pemerintahan demokratis, tidak ada jarak antara keinginan rakyat banyak dengan apa yang diperjuangkan penguasa secara politis (www.ri.go.id).

Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi politik masyarakat merupakan suatu proses keterlibatan masyarakat secara sadar dan nyata dalam serangkaian proses pembangunan mulai dari tingkat perencanaan (perumusan kebijakan) hingga pada tingkat pengendalian (pengawasan dan evaluasi) program pembangunan. Pengertian partisipasi menurut Davis adalah penentuan sikap dan keterlibatan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya sehingga akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi serta pengambilan bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama (Davis, 1990:125).

Dengan demikian unsur-unsur penting dari partisipasi adalah : *pertama*, Partisipasi merupakan keterlibatan mental atau emosional seseorang yang lebih daripada keterlibatan fisik. *Kedua*, adanya kesediaan untuk memberikan kontribusi dalam program pembangunan, baik itu tenaga, uang, keterampilan, pemikiran dan lain sebagainya. *Ketiga*, Dalam partisipasi terdapat kesediaan untuk bertanggung jawab.

Pada dasarnya partisipasi masyarakat dan pembangunan mencakup dua aspek, yaitu, hak dan kewajiban. Dalam aspek hak dimaksudkan bahwa pada dasarnya setiap warga negara mempunyai peluang untuk berpartisipasi guna memanfaatkan kesempatan yang timbul dalam proses pembangunan di samping berhak menikmati hasil pembangunan tersebut.

METODE PENELITIAN DAN ANALISIS

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Cara menjangkau informan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* atau sampel bertujuan. Dalam penelitian ini informan merupakan *stakeholder* yang terdapat di kabupaten Ciamis yang dianggap paling mewakili tentang fokus kajian studi kasus ini. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif dari Mathew B. Miles dan Michael Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks dan Kronologis Desakan Pemekaran

Desakan pemekaran Ciamis wilayah selatan dipengaruhi banyak faktor yang kompleks yang sudah dibahas di awal sebagai dampak anusiasme daerah dalam mengurus daerah dan menentukan nasib sendiri pasca Reformasi 1998. Namun selain antusiasme yang memang standar terjadi di hampir semua wilayah di Indonesia, konteks desakan kelompok masyarakat di wilayah Ciamis Selatan memiliki konteks dan *setting* tertentu. Semisal luasnya wilayah geografis di wilayah Pangandaran ke pusat ibu kota yang mencapai jarak di atas 70 km/jam³, sehingga menyusahakan masalah urusan publik di wilayah ini.

Pada tahun 2007, setelah melalui proses panjang dan melelahkan, dalam upaya untuk meneruskan lembaga yang sebelumnya pernah ada—semisal Paguyuban Masyarakat Pakidulan-- dalam memperjuangkan pemekaran, maka muncullah Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran (PPKP). Lembaga ini muncul atas keinginan masyarakat Pangandaran dan sekitarnya (sepuluh kecamatan). Badan Perwakilan Desa yang merupakan lembaga perwakilan formal di tingkat desa dari kesepuluh kecamatan tersebut akhirnya bersepakat memberikan mandat pada lembaga yang nantinya melanjutkan perjuangan pemekaran yang sudah disuarakan sejak tahun 2001 itu. Oleh karena itulah muncul PPKP yang mendapat mandat dari BPD-BPD semua desa yang ada di kecamatan-kecamatan tadi.

Dalam proses naik-turunnya proses desakan pemekaran, konflik kemudian timbul antara mereka yang ingin tetap mempertahankan Ciamis, yang diwakili oleh elit-elit politik konservatif, terutama yang berasal dari luar daerah yang akan dimekarkan. Sedangkan mereka yang terus-menerus “ngotot” ingin menjadikan wilayah Ciamis Selatan menjadi kabupaten direpresentasikan oleh sekelompok elit yang memang dari dulu selalu kritis terhadap pemerintahan rezim yang berkuasa dan juga asli putra daerah Ciamis Selatan semisal Jeje Wiradinata (Mantan Ketua DPRD Kab. Ciamis)⁴. Semasa Jeje Wiradinata menjabat ketua DPRD

³ Hal inipun pernah dikatakan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Prof. DR. Ahmad Surya ketika berkunjung ke Parigi, tanggal 30 Juli 2010.

⁴ Perseteruan politik kemudian mengkerucut pada konflik elit-elit politik di Ciamis yang memiliki dukungan masing-masing kuat. Engkon Komara merupakan putra Panjalu yang juga Bupati Ciamis yang mencalonkan kembali dalam Pilkada 2009 melawan tokoh-tokoh dari Ciamis Selatan, seperti Bapak Totong, Supratman, Jeje Wiradinata (ketua DPRD) yang memang kebetulan putra

selalu gencar melakukan upaya pemekaran, namun selalu terganjal oleh elit pemerintahan lokal dan kelompok elit lainnya.

Ketua DPRD Ciamis saat itu, Jeje Wiradinata mengungkapkan kesimpulan hasil kajian tim kecil yang secara khusus meneliti persoalan perkembangan perekonomian di wilayah yang sebelumnya menghendaki pemekaran. Kajian yang dilakukan tim tersebut, juga berpegang pada PP 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Hal tersebut juga dikuatkan dengan penelitian dari Universitas Padjadjaran yang merekomendasikan Ciamis Selatan layak untuk menjadi kabupaten di tahun 2007 dengan alasan berdasarkan penilaian, calon daerah otonom tergolong mampu dengan nilai 412 (persyaratan minimal 340). Demikian pula induk daerah otonom tergolong pada kategori sangat mampu⁵.

Di sisi lain Bupati Ciamis dan birokrat Ciamis yang *nota bene* tidak sepatutnya dengan pemekaran Ciamis Selatan mengajukan keberatan dengan dalih belum saatnya dan belum layaknya Ciamis Selatan untuk pemekaran. Dan di tahun 2008 Bupati Ciamis menunjuk Universitas Padjadjaran yang bekerja sama dengan ITB untuk melakukan pengkajian ulang layak tidaknya Ciamis Selatan berpisah dari Ciamis. Hasilnya adalah Ciamis Selatan belum layak menjadi kabupaten sendiri, dikarenakan produksi non migas yang diharapkan sebagai sumber pendapatan *domestic regional bruto* (PDRB) dinilai kurang memberikan kontribusi pada pertumbuhan perekonomian Jawa Barat.

Menurut Supratman (presidium saat ini), kemunduran proses pemekaran ini salah satunya dikarenakan Jeje Wiradinata yang memang selama ini cukup mendukung pemekaran, di tahun 2008 justru sepertinya *acuh tak acuh* dalam mengcounter upaya yang dilakukan pemerintah, atau bersikap setengah hati. Perubahan sikap ini disinyalir karena posisinya yang saat itu sebagai calon Bupati Ciamis pada Pilkada 2009 bersama Engkon Komara. Sikap ini dilakukan dikarenakan Jeje Wiradinata ingin mempertahankan dan “mencuri” suara dari utara Ciamis, semisal Panjalu, Kawali, Cihaurbeuti yang selama ini dianggap basis dukungan politik Engkon Komara. Sikap ini tentunya memberikan kekecewaan tersendiri bagi presidium kabupaten Ciamis Selatan yang namanya

Pangandaran dan para politisi Partai Amanat Nasional seperti bapak Adang yang cukup giat menyuarakan pemekaran Pangandaran. Setelah lama berproses dan kabupaten Pangandaran sudah di ketok Palu di DPR, sikap pemerintah mulai melunak dan cenderung netral saat ini.

⁵ www.pikiranrakyat.online.com, Edisi 11 Desember 2008.

menjadi Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran (PPKP) di tahun 2007. Tokoh-tokoh lokal bermunculan dalam upaya yang selama ini sudah ditempuh, semisal Supratman, Haji Adang, Andis Sose dan lainnya.

Jeje Wiradinata justru mengungkapkan hal yang berbeda dengan presidium, memang ketidaksepakatan dan kontra terhadap itu ada di pemerintah—Engkon Komara, dkk--, namun sepengetahuannya pemerintah Engkon Komara tidak mempersulit proses. Lewat lobi-lobi yang dilakukan DPRD, terutama wakil dari Ciamis Selatan, bupati memberikan persetujuan pembentukan kabupaten baru. Hal ini menjadi salah satu syarat administrasi yang wajib dipenuhi, selain persetujuan DPRD induknya⁶. Jadi anggapan konflik terjadi antara yang pro dan kontra yang keras salah besar, hal itu terlalu dipolitisir dan dibesar-besarkan. Kalaupun pemerintah pada awalnya kontra, tapi tidak sampai terjadi mobilisasi dukungan. Selama ini proses berlangsung sesuai prosedur yang berlaku

Di bulan Agustus 2009 wacana tersebut kembali mengemuka dan memiliki titik terang serta semangat baru bagi mereka yang pro pemekaran. Hal ini dikarenakan DPRD provinsi Jawa Barat mengesahkan pemekaran Ciamis dan kabupaten Pangandaran dan selanjutnya DPRD Jabar akan mengajukan usulan ke DPR RI untuk dibuatkan RUU-nya⁷. Bahkan UU tersebut akhirnya disahkan DPR RI dan demi mengecek kondisi di lapangan, DPR RI komisi II datang langsung ke Pangandaran dan sempat mengunjungi Parigi (cikal bakal ibu kota kabupaten Pangandaran) pada hari Sabtu, 25 September 2010 dihadiri pejabat lokal dan unsur Muspida kabupaten Ciamis, tokoh masyarakat dari berbagai kalangan, presidium, dan rombongan dari DPR RI. Rombongan DPR RI yang saat itu mengahadiri berjumlah 18 orang dan 14 orangnya wakil rakyat, mereka adalah H. Abdul Wahab Dhalimunthe, Drs. H. Amrun Daulay, Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, Nuruh Arifin, dan Yasona H. Laoly. Selain itu, Vanda Sundajang, HM Gamari Sutrisno, TB Soemandjaya, Drs. H. Rusli Ridwan, H. Nu'man Abdul Hakim, Dra. Ida Faujiah, Harun Al Rasyid, dan Miryam S. Haryani. Acara ini diwarnai unjuk rasa ratusan warga Pangandaran yang menyatakan dukungannya terhadap komisi II DPR yang memperjuangkan pemekaran.

⁶ Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No.78 tahun 2007, pasal 5 ayat 2 tentang Pembentukan Daerah

⁷ Lihat dalam www.mypangandaran.com

Hasilnya DPR RI menyambut baik dan menyatakan akan membantu secepatnya proses pemekaran di wilayah Ciamis Selatan ini⁸.

Tentang kerja sama dan bantuan yang dimaksudkan di atas, Wakil Bupati Ciamis, ling Syam Arifin menjelaskan bahwa Ciamis saat ini sudah siap memberikan 4.076 PNS yang meliputi PNS dari golongan I/a sampai PNS golongan IV/c. Di antaranya 2 orang PNS golongan IV/c, 18 orang PNS golongan IV/b, 33 orang PNS golongan IV/a serta 42 PNS golongan III/d. Pada rapat paripurna pembahasan persetujuan penyerahan asset sebagai salah satu syarat pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Pangandaran. Personil ke-4.078 PNS tersebut kini masih bertugas di 10 kecamatan yang menjadi rencana wilayah Kabupaten Pangandaran yakni Kecamatan Mangunjaya, Padaherang, Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, Cimerak, Cigugur dan Kecamatan Langkaplancar. Mulai dari PNS yang bertugas di kantor kecamatan maupun desa, UPTD berbagai dinas dan lembaga termasuk BP3K (penyuluh) dan PNS unit lainnya berikut sekolah-sekolah yang ada di 10 kecamatan tersebut. Sedangkan kekurangan 659 PNS lagi diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan baru Kabupaten Pangandaran nanti untuk merekrutnya dari Pemkab/Pemkot di luar Kabupaten Ciamis⁹. *Asset-asset*, baik barang bergerak maupun tidak bergerak sudah diberikan ke Pangandaran. Hal-hal tersebut diperlukan untuk membangun berbagai infrastruktur pemerintahan kabupaten Pangandaran yang tentunya tidak sedikit.

Ketegangan antar Aktor dan Tarik Ulur Kepentingan

Konflik politik dalam momentum desakan pemekaran Ciamis dan Pangandaran memperlihatkan pada kita bagaimana momentum pemekaran ini menjadi arena pertarungan antar elit lokal (kontentius politik) dalam mengukuhkan kekuasaan masing-masing. Bicara kekuasaan dalam kajian Ilmu Politik memang berkulat pada mendapatkan, mengelola dan mempertahankan kekuasaannya itu. Proses kontentius politik antar elit pun akan berkulat pada persoalan tersebut. Seperti yang disebutkan dalam kajiannya Pareto seperti diulas di atas, bahwa elit memiliki kemampuan lebih dalam semua hal, termasuk menunggangi gegar demokrasi saat ini. Mereka selalu mengatakan bahwa yang

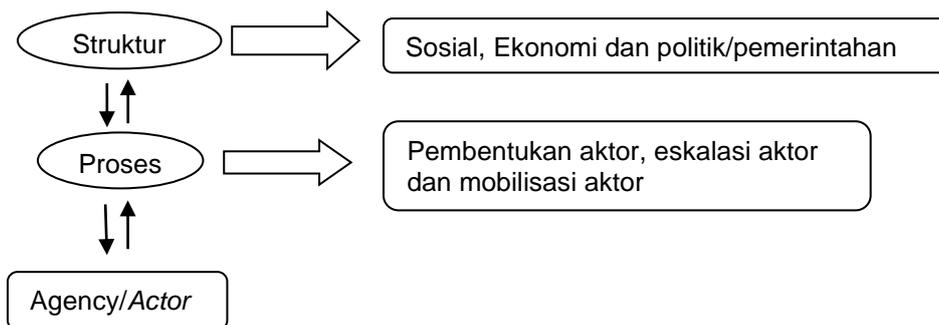
⁸ Satimin, dalam <http://www.mypangandaran.com/berita/list/informasi-khusus-pemekaran.html>, tanggal 25 September 2010

⁹ Dalam Tribun Jabar, Edisi 23 Juli 2010

terjadi adalah proses demokrasi. Andaikata pun ada pertarungan, hal itu merupakan sesuatu yang wajar dalam koridor demokratisasi. Namun menjadi picik, jika kepentingan politik dan ambisi pribadi serta kelompoknya yang mengatasnamakan demokrasi justru kontra-produktif bagi kesejahteraan itu sendiri.

Pertautan antar kepentingan elit dalam pemekaran Pangandaran ini akan digambarkan dalam model ketegangan politik (kontentius politik) yang muncul diantara kelompok-kelompok elit yang memiliki kepentingan dengan proses ini. Dalam model kontentius digambarkan adanya : (1) struktur yang menjadi *setting* pertentangan tersebut, (2) proses pertentangan tersebut, yang meliputi pembentukan aktor, eskalasi aktor dan mobilisasi aktor. (3) mobilisasi aktor. Model ini kalau digambarkan sebagai berikut :

Bagan 1. Analisis Setting, Proses dan Pertarungan Aktor



Struktur yang menjadi lahan pertautan kepentingan antar aktor politik adalah sosial, ekonomi, dan politik dan pemerintahan. Lahan-lahan inilah yang dijadikan ajang pertempuran dalam proses pemekaran ini. Kalau kita lihat isu-isu yang kemudian “membubung” adalah persoalan kemudahan dalam pelayanan publik, akses untuk mendapatkan layanan tersebut, sumber daya alam dan pengelolaannya, isu kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah Ciamis Selatan.

Isu-isu besar tersebut yang dijadikan ranah pertentangan selama ini. Kelompok yang pro (Presidium dan tokoh-tokoh Ciamis Selatan) melihat bahwa hal-hal yang disebutkan di atas di kawasan Ciamis Selatan mengalami kemunduran dengan kondisi jarak geografis yang begitu luas, kemampuan pemerintah menjadi terbatas mengurus semua persoalan masyarakat. Sehingga tuntutan pemekaran adalah jalan yang tepat. Sedangkan kalangan pemerintahan

(pimpinan Engkon Komara), menganggap bahwa isu-isu tersebut bukan menjadi alasan yang kuat bagi masyarakat untuk memisahkan diri dari Ciamis. Pemerintah selalu berusaha melakukan yang terbaik bagi warganya, apabilamasih ada kelemahan selama ini, masih ada solusi yang lebih tepat selain pemekaran, semisal hambatan geografis, sehingga mempersulit pelayanan publik di wilayah Ciamis Selatan bisa dicarikan solusi semisal kantor pelayanan yang ditempatkan di Pangandaran. Pemerintah melihat justru kepentingan elit-elit politik lokal yang lebih mendominasi dalam pemekaran kabupaten Pangandaran.

Aktor-aktor politik lokal yang berhadap-hadapan pada awalnya adalah konflik antara yang pro-pemekaran dan yang kontra pemekaran. Aktornya diidentifikasi yang pro dipimpin oleh tokoh-tokoh yang bergabung dalam Paguyuban Masyarakat Pakidulan (PMP) dengan pemerintah kabupaten Ciamis yang direpresentasikan oleh bapak Engkon Komara. Proses *vis a vis* kedua aktor yang bersilang pendapat inilah dalam konsep di atas disebut sebagai proses pembentukan aktor. Dari informasi informan dan data sekunder menunjukkan bahwa pemerintah di bawah pimpinan bapak Engkon Komara sangat antipati terhadap proses pemekaran tersebut. Namun di sisi lain Paguyuban juga sangat semangat dan pantang menyerah dalam memperjuangkan pemekaran ini. Arena pertarungan meliputi struktur ekonomi, sosial, politik dan pemerintahan.

Aktor yang berhadapan pada awalnya sederhana yakni pemerintah dan masyarakat Pangandaran yang terepresentasi pada Paguyuban Masyarakat Pakidulan mengalami perluasan aktor. Pemerintah kemudian menggandeng lembaga akademis semisal Unpad yang pada awalnya digunakan untuk membuat penelitian uji kelayakan pemekaran. Walaupun lembaga ini netral namun kesimpulan penelitian saat itu yang menyimpulkan bahwa Pangandaran belum layak pemekaran dijadikan legitimasi pemerintah untuk tidak merespon bahkan mematikan wacana pemekaran. Pemberitaan-pemberitaan pun lebih mengarah pada ketidaklayakan Pangandaran untuk memekarkan diri. Namun di sisi lain Paguyuban Masyarakat Pakidulan pun tidak tinggal diam, mereka menggandeng tokoh-tokoh politik lokal yang disegani di kabupaten semisal ketua DPRD Jeje Wiradinata dan juga Fraksi Partai Amanat Nasional.

Konflik politik yang muncul kemudian di akhir-akhir ini, terutama pasca kunjungan anggota DPD-RI di pertengahan tahun 2010 lalu, tidak lagi dalam

porsi berhadap-hadapannya antara yang pro dan yang kontra, namun lebih kepada tarik-menarik kepentingan antar elit, kesalahpahaman, miskomunikasi dan barangkali secara sarkastik bisa dibilang siapa yang merasa paling depan memperjuangkan pemekaran. Hal ini dimungkinkan kepentingan para elit lokal, baik yang memperjuangkan sejak awal ataupun yang baru, pada orientasi pasca pemekaran. Kepentingan tersebut semisal pemilihan bupati dan pejabat penting lainnya.

Pertentangan tersebut seperti terlihat dalam pertentangan dan protes yang dilakukan presidium terhadap agenda dengar pendapat yang diselenggarakan DPRD Ciamis dengan Tim 12 nya (Pansus Pemekaran Ciamis Selatan) pada tanggal 26 Juli 2010. Presidium justru menganggap pertemuan tersebut menunjukkan DPRD tidak tahu apa-apa tentang pemekaran, karena dengar pendapat tersebut justru akan mengganggu proses yang sudah berjalan di DPR. Harusnya dewan langsung berkomunikasi langsung dengan presidium, karena sudah mendapat mandat dari masyarakat lewat BPD-BPD di Ciamis Selatan. Walaupun dewan punya kewenangan, tetapi jangan sampai melangkahi tugas dan fungsi dari presidium¹⁰.

Sedangkan Jeje Wiradinata, politisi kawakan Ciamis asal Pangandaran, memang memiliki peran yang tidak sedikit tentang pemekaran ini. Namun kekecewaan presidium terjadi karena sikapnya pernah "mendua" di tahun 2008-2009 ketika beliau masih menjabat ketua DPRD kabupaten Ciamis. Sikap ini dianggap tokoh pemekaran (Supratman, informan) untuk mendapatkan suara dari Ciamis sebelah utara, sejak saat itu presidium antipati dengan bapak Jeje Wiradinata. Sikap Jeje saat ini mendukung pemekaran, disinyalir ingin mendapat dukungan pencalonannya menjadi bupati Pangandaran, yang memang sudah terdengar gencar rencana pencalonannya.

Dalam menyikapi tudingan dan kekecewaan dari presidium saat ini, Jeje Wiradinata (mantan ketua DPRD, informan) menganggap hal itu salah besar dan salah memahami sikapnya. Hal ini dikatakannya berikut :

"Kekecewaan dan tudingan itu --kalaupun memang ada-- dari presidium mungkin bersifat pribadi. Mungkin ada ketidaksukaan terhadap saya. Padahal peran saya dan DPRD Ciamis dalam menggolkan pemekaran sampai ke DPR RI saat ini tidak diragukan lagi. Kalau tidak ada pengesahan DPRD *kan* tidak mungkin pemekaran gol ?, DPRD di jaman saya juga mengesahkan pembiayaan untuk uji akademis kelayakan saat itu

¹⁰ Lihat di berita Khusus Pangandaran, www.mypangandaran.com, Edisi 27 Juli 2010.

dari Unpad sekitar 500 juta, dan uji ulang sekitar 150 juta, bahkan saya juga sempat membuat Pansus untuk mengawal proses secara kelembagaan. Sedangkan tentang suara dari utara justru sebaliknya, saya *malah* tidak mendapatkan suara, dikarenakan saya harus jujur berkata “ya” pemekaran jadi, ketika penduduk menanyakan jadi atau tidaknya pemekaran. Padahal mereka sangat kontra dengan pemekaran saat itu. Hal ini saya lakukan karena saya tidak bisa berbohong pada masyarakat, walaupun akhirnya harus kehilangan suara saat itu”.

Apa yang disampaikan Jeje Wiradinata justru bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Supratman (ketua Presidium Kabupaten Pangandaran), Jeje Wiradinata justru menganggap antipati presidium dibawah pimpinan Supratman lebih kepada masalah pribadi, pernyataannya tentang “mendua”nya sikap dirinya terhadap pemekaran Pangandaran sangat tidak beralasan, dikarenakan DPRD di masa kepemimpinannya selalu pro-aktif dan mengawal setiap proses. Jeje menganggap langkahnya selama ini sudah tepat dan berimbang sesuai dengan aspirasi. Dirinya tidak mengintervensi aspirasi masyarakat, semuanya dibiarkan berproses apa keinginan masyarakat.

Jeje Wiradinata mensinyalir antipati tersebut dikarenakan ada isu dirinya akan mencalonkan diri sebagai bupati Pangandaran, jika sudah dimekarkan nanti. Presidium yang kebetulan saat ini dipimpin pak Supratman tidak suka dengan isu ini, dikarenakan kemungkinan Supratman sendiri juga akan mencalonkan diri sebagai bupati. Kepentingan inilah yang kemungkinan besar “menyelewengkan” apa yang sebenarnya terjadi. Menurutnya persoalan nanti siapa yang akan mencalonkan bupati tidak masalah siapapun yang penting mampu. Dan jika dirinyapun maju, itu bukan ambisi pribadi, tetapi amanah partainya—Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan—sebagai kewajiban dalam proses politik. Apalagi PDI-P adalah partai besar di Ciamis dan Pangandaran, sehingga wajar mengajukan calonnya dalam pemilihan bupati.

Dalam proses perluasan eskalasi aktor tersebut, masing-masing aktor awal yang berkonflik memobilisasi aktor yang memiliki kesamaan kepentingan, sehingga bermetamorfose ke bawahnya. Walaupun kemudian dalam kasus pemekaran Pangandaran ini, mobilisasi lebih kuat di pihak yang pro pemekaran. Hal ini terbukti dari perkembangan terkini pihak pemerintah yang selama ini menentang pemekaran, mulai melunak dan mau bekerja sama membantu proses pemekaran. Selain itu juga muncul aktor netral yang dalam dataran tertentu bisa dimanfaatkan oleh aktor utama tadi untuk melegitimasi posisinya. Selain itu juga

muncul aktor politik yang menunggangi proses pemekaran ini untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan dan ambisi pribadinya.

Dari analisis di atas, golongan elit (pemerintahan, elit masyarakat, mantan pejabat, agamawan dan lainnya) banyak terjadi luka-liku persoalan dan pertautan kepentingan. Mereka selalu saja memanfaatkan momentum yang ada untuk memenuhi ambisi dan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Hal ini memang tidaklah aneh, karena biasanya elit memiliki tabiat seperti yang disebutkan di atas. Ilmuwan Wertheim¹¹ misalnya pernah menyindir kondisi ini. menurutnya pemahaman elit tentang massa yang selama ini menjadi *taken for granted*, adalah bahwa massa tidak tahu apa-apa, pengikut setia (pembebek). Hal inilah sebenarnya yang sepenuhnya harus dirubah. Bagaimana kemudian elit yang memiliki kelebihan dalam berbagai bidang mampu menjadi fasilitator dalam pendidikan politik, mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasi politik dan kepentingan umum yang kemudian diusung.

Jangan sampai politik dijadikan ladang subur untuk untuk “membuncitkan” perut sendiri dan mengangung-agungkan kebesaran kelompoknya. Pertarungan dalam konteks politik bukanlah sesuatu yang tabu dan bahkan dalam dataran tertentu positif, namun pertarungan tersebut menjadi *picik* jika hanya kepentingan kekuasaan yang berorientasi personal yang dikedepankan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dipaparkan dapat diambil suatu kesimpulan, yaitu terlihat bagaimana kerasnya perjuangan masyarakat Pangandaran dalam mengusung pemekaran, namun di sisi lain juga terlihat adanya upaya dari segelintir politisi yang memanfaatkan hal ini untuk ambisi dan kepentingan pribadinya. Di luar kontentius yang terjadi seperti dibahas dalam analisis di atas, keberhasilan masyarakat Pangandaran dan sekitarnya lewat representasi peran presidiumnya, sehingga saat ini proses pemekarannya hampir final, menunjukkan kekompakkan dan desakan masyarakat yang begitu kuat tidak bisa dihalangi oleh kekuasaan rezim sekalipun. Namun, moment ini sudah menjadi lahan subur arena pertarungan antar elit politik lokal yang memiliki berbagai kepentingan di dalamnya, pertarungan inilah yang menyebabkan proses penuh

¹¹ Dalam WF. Wertheim, *Elite vs Massa*, Resist Book, Yogyakarta, 2009

dinamika dan dalam dataran tertentu terjadi tarik-ulur. Apapun hasil yang didapat dari proses pemekaran ini yang jelas sangat dibutuhkan masyarakat adalah kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brata, Kusumah, dan Solihin, Dadang, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, dan Jurusan Ilmu Politik FISIP UNSOED, 2003, *Laporan Hasil Analisis Monitoring dan Evaluasi Otonomi Daerah Menurut UU No. 22 dan UU No. 25 Tahun 1999 di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Gaffar, Afan, dkk, 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Haris, Syamsuddin, 2001, *Paradigma Baru Otonomi Daerah*, Pusat penelitian politik LIPI, Jakarta.
- Haryanto, 2005, *Kekuasaan Elit; Suatu Bahasan Pengantar*, PLOD-JIP Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Jurnal Otonomi Daerah, Edisi Juni 2002, *Demokratisasi, Pemberdayaan Masyarakat Lokal dan Tantangan Nasional*.
- Jurnal Pendidikan dan Monitoring Pembangunan Otonomi Daerah, Edisi, September 2000, *Basis Asosiasi Lokal Untuk pembangunan Otonomi Daerah*, LP2OD-KW dan PUISUI, Jakarta.
- Lembaga Studi dan Advokasi Kerjasama dengan Departemen Dalam Negeri, 2003, *Evaluasi dan Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan Otonomi Daerah*.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta.
- Moleong, L. J, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung
- Nugroho D, Riant, 2000, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*. PT ELEX Media Komputindo, Jakarta.
- Sarundajang, S.H, 2002, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Saefullah, Eep, 2000, *Pengkhianatan Demokrasi A la Orde Baru*, Rosdakarya, Bandung.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1999, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.

Republik Indonesia, 2000, "*Undang-undang No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*".

Republik Indonesia, 2004, "*Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*", Fokus Media, Bandung.

Republik Indonesia, 2004, "*Undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*", Fokus Media, Bandung.

Saifudin Fedyani, Akhmad, 1990, *Panduan Dasar Ilmu-Ilmu Sosial*, Rajawali Press, Jakarta.